

persoalan integrasi Timor-Timur tahun 1976 ke pangkuan NKRI, akhirnya menyebabkan tolak ukur 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari Australia dan Indonesia menjadi kabur. Situasi ini jelas membawa kerugian bagi Indonesia. Tentu saja, perumusan kembali batas landas kontinen bertujuan untuk menciptakan iklim keadilan serta memperjelas batas-batas kedaulatan masing-masing negara. Pemerintah harus berani bertindak cepat dan tegas karena insiden ini telah mengusik kedaulatan NKRI.

Ketiga, perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Perbaikan kualitas SDM di NTT haruslah pula menjadi fokus perhatian yang urgen oleh pemerintah pusat dan daerah karena tanpa disadari atau tidak, faktor SDM juga menjadi salah satu akar masalah mengapa masyarakat di sana masih terus bergulat dalam kemiskinan. Program-program penyuluhan dan pembinaan untuk para nelayan khususnya, jelas amat dibutuhkan. Dengan peningkatan SDM diharapkan ke depan masyarakat di Pulau Rote, Ndao, dan Sabu, dapat memanfaatkan Sumber Daya di Laut Timor yang berlimpah secara benar dan bertanggung jawab sehingga dapat menciptakan kemashalatan.

Keempat, pemberian bantuan dana oleh pemerintah kepada para nelayan dan petani rumput laut yang menjadi korban langsung atas terjadinya insiden tersebut, agar mereka dapat menutup kerugian yang dialami serta dapat memulai kembali pekerjaan yang sempat terhenti. Dana yang dimaksud dapat saja diambil dari APBN maupun APBD. Tentu dengan catatan dana tersebut betul-betul dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan malah disimpan di kantong oknum pemerintah pusat maupun daerah alias dikorupsi.

## **Penutup**

Penanganan insiden meledaknya kilang minyak Montara di kawasan Laut Timor sudah sepatutnya menjadi perhatian kita semua. Bagaimana kita berupaya agar menjaga potensi yang ada di Laut Timor tidak terbuang dan rusak secara percuma. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang berhak dan siapa yang tidak, peristiwa ini meninggalkan pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai bangsa maritim, maka sudah sepatutnya pemerintah mencegah preseden yang sama terjadi di masa depan. Dalam konteks permasalahan pencemaran Laut Timor,